

Inggris Larang Imigran Ilegal Tetap Tinggal

LONDON(IM)-Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak mengatakan siapapun yang tiba dengan cara ilegal akan dicegah untuk tetap tinggal di Inggris. Hal ini disampaikan menjelang legislasi baru yang diperkirakan akan diumumkan pekan depan.

Sunak ditekan anggota parlemen dari partainya sendiri untuk menemukan solusi masalah gelombang imigran ilegal yang datang ke Inggris melalui selat Inggris. Sunak menjadikan upaya menghentikan gelombang imigran yang datang dengan perahu kecil sebagai salah satu lima prioritasnya.

"Jangan salah, bila anda datang ke sini dengan ilegal, anda tidak dapat tetap tinggal," kata Sunak dalam wawancara dengan surat kabar Inggris the Mail, Senin (6/3).

Berdasarkan ketentuan saat ini, pencari suaka yang datang ke Inggris biasanya dapat tetap tinggal di negara itu sampai kasus mereka didengar.

The Mail melaporkan Undang-undang baru untuk mengatasi masalah ini akan disampaikan pada Selasa (7/3). Setelah lebih dari 45 ribu orang melakukan pelayaran berbahaya menuju Inggris tahun lalu. Data resmi menunjukkan pengajuan suaka ke Inggris masih di bawah rata-rata negara Uni Eropa.

Tahun lalu mantan Perdana Menteri Boris Johnson menyetujui kesepakatan untuk mengirim puluhan ribu imigran yang datang dari Afghanistan, Suriah dan negara-negara perangnya lainnya, ke Rwanda.

Kebijakan ini menghadapi gugatan hukum setelah rencana deportasi yang pertama diblokir di menit-menit terakhir oleh Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa. Pengadilan Tinggi London memutuskan kebijakan itu sah, tapi orang-orang yang menentangannya akan mengajukan banding atas putusan itu.

Ditanya Sky News apakah orang-orang yang datang ke Inggris dengan ilegal dilarang meminta suaka. "Saya yakin ya," kata Menteri Negara untuk Irlandia Utara Chris Heaton-Harris. "Jika orang-orang yang datang ke negara ini dengan ilegal maka mereka akan dipulangkan atau dikirim ke suatu tempat seperti Rwanda," katanya.

The Mail melaporkan berdasarkan undang-undang yang baru klaim suaka orang-orang yang datang ke Inggris dengan perahu kecil akan ditolak. Mereka akan dipindahkan dan dilarang kembali ke Inggris selamanya.

"Undang-undang kami akan memiliki praktik dan maksudnya sederhana, rute menuju Inggris akan aman dan sesuai hukum," kata Menteri Dalam Negeri Suella Braverman pada surat kabar the Sun.

Heaton-Harris mengatakan ia yakin rute yang lebih aman dan legal akan masuk dalam rencana yang baru. **gul**

Ukraina Tuduh Rusia Culik Puluhan Ribu Anak-anak: Ini Genosida

KIEV(IM)- Anggota parlemen Ukraina, Ivanna Klymush-Tsintsadze, menyebut puluhan ribu anak-anak Ukraina hilang selama perang. Ia menuduh pasukan Rusia mendeportasi anak-anak itu dan mengubah kewarganegaraan mereka.

Klymush-Tsintsadze menyatakan Federasi Rusia melakukan "genosida" dengan mendeportasi anak-anak tersebut. Ia menuduh pemerintah Rusia mengirim anak-anak itu untuk dibesarkan keluarga-keluarga Rusia.

"Kami punya sekitar 13.000 kasus terkonfirmasi tentang anak Ukraina yang dideportasi ke berbagai wilayah Federasi Rusia," kata Klymush-Tsintsadze kepada siaran Sky via The Guardian, Senin (6/3).

"Namun, kami juga punya informasi tentang lebih banyak lagi dari mereka, dihitung puluhan ribu. Namun, kami belum punya catatan resmi mengenainya, dan ini adalah genosida yang dilakukan Federasi Rusia terhadap bangsa Ukraina," lanjutnya.

Klymush-Tsintsadze menambahkan, pihaknya berhasil mengembalikan sekitar seratus anak-anak Ukraina ke keluarga mereka berkat bantuan organisasi-organisasi kemanusiaan.

Dia menyebut anak-anak Ukraina diculik Rusia setelah dipisahkan dari orang tua mereka di kamp-kamp penyangkutan. Ia menuduh sebagian anak telah diadopsi keluarga-keluarga di Rusia.

"Saya pikir skala dari aktivitas yang sangat tragis yang dilakukan otoritas Rusia ini hanya akan diketahui setelah kami membebaskan seluruh wilayah Ukraina," kata Klymush-Tsintsadze.

Pada kesempatan terpisah, militer Ukraina mengklaim berhasil menahan upaya pasukan Rusia mengepung Bakhmut. Pasukan Ukraina dilaporkan semakin terdesak di kota tersebut. Per Minggu (5/3), Angkatan Bersenjata Ukraina berikrar akan mempertahankan kota itu dan mengaku berhasil menghalau "lebih dari 130 serangan" di Kupyansk, Lyman, Bakhmut, dan Avdiivka. **ans**

PBB Sepakati Teks Perjanjian Internasional Pertama untuk Lindungi Laut Lepas

NEWYORK(IM)-Negara anggota PBB akhirnya menyetujui teks perjanjian internasional pertama untuk melindungi laut lepas dan keayaannya. Proses diskusi dan pembahasan tentang perjanjian itu telah berlangsung selama 15 tahun, termasuk empat tahun pembicaraan formal.

"Kapal telah mencapai pantai," kata Rena Lee, tokoh yang memimpin sesi negosiasi terakhir saat mengumumkan tentang tercapainya kesepakatan tentang perjanjian internasional untuk melindungi laut lepas di markas PBB di New York, Amerika Serikat (AS), pada Minggu (5/3) malam waktu setempat, dikutip laman The National.

Pengumuman itu disambut riuh tepuk tangan para delegasi negara. Pembicaraan tentang perjanjian itu telah dilakukan secara intensif selama dua pekan terakhir. Kendati sudah disepakati, tajuk dari teks perjanjian tidak segera dirilis. Lee mengungkapkan, karena sudah disepakati, teks dari perjanjian tidak dapat diubah secara signifikan. "Tidak ada nada pembuka kembali atau diskusi substansi," ujarnya.

Menurut dia, perjanjian tersebut bakal diadopsi secara resmi setelah diperiksa oleh pengacara dan diterjemahkan ke dalam enam bahasa resmi PBB. Kelompok pemerhati lingkungan, Greenpeace, menyambut disepakatinya perjanjian itu. "Ini adalah hari bersejarah untuk konservasi dan tanda bahwa di dunia yang terpecah, melindungi alam dan manusia dapat menang atas geopolitik," ujar Laura Meller dari Greenpeace.

Meller menyerukan negara-negara untuk secara resmi mengadopsi perjanjian itu dan meratifikasinya secepat mungkin. Laut lepas dimulai dari perbatasan zona ekonomi eksklusif (ZEE) suatu negara yang membentang hingga 200 mil laut atau 370 kilometer dari garis pantainya. Lepas dari ZEE, laut tidak berada di bawah yurisdiksi negara mana pun.

Laut lepas mencakup lebih dari 60 persen lautan dunia dan sekitar separuh permukaan planet. Kendati demikian, perhatian atas laut lepas jauh lebih sedikit dibandingkan perairan pesisir dan beberapa spesies terkenal. Ekosistem laut menciptakan separuh oksigen yang dihirup manusia. Ia pun berperan dalam membatasi pemanasan global dengan menyerap banyak karbon dioksida yang dipancarkan oleh aktivitas manusia. Tapi mereka terancam oleh perubahan iklim, polusi, dan penangkapan ikan berlebihan.

Hanya sekitar satu persen dari laut lepas yang saat ini dilindungi. Ketika perjanjian baru mulai berlaku, hal itu akan memungkinkan terciptanya kawasan lindung laut di perairan internasional. **gul**

全国政协十四届一次会议记者会

Press Conference for the First Session of the 14th CPPCC National Committee



IDN/ANTARA

KONFERENSI PERS SESI PERTAMA CPPCC KE-14

Kepala komite pusat partai politik non-Komunis dan Federasi Industri dan Perdagangan Seluruh Tiongkok menghadiri konferensi pers selama sesi pertama Komite Nasional Konferensi Konsultatif Politik Rakyat Tiongkok (CPPCC) ke-14 di Aula Besar Rakyat di Beijing, Tiongkok, Minggu (5/3).

Populasi Jepang Terancam Punah, Angka Kelahiran Merosot ke Rekor Terendah

Jepang mencatat jumlah kematian dua kali lebih banyak dari kelahirannya. Negara itu memiliki kurang dari 800.000 kelahiran dan sekitar 1,58 juta kematian.

TOKYO(IM)-Penurunan angka kelahiran di Jepang mengancam eksistensi Negeri Matahari Terbit, menurut penasihat Perdana Menteri Fumio Kishida. Masalah angka kelahiran ini berpotensi menghancurkan jaring pengaman sosial dan ekonomi.

"Jika kita terus seperti ini, negara ini akan hilang," kata Masako Mori dalam sebuah wawancara di Tokyo.

Hal ini disampaikan Mori setelah Jepang, pada 28 Februari lalu mengumumkan penurunan jumlah kelahiran pada 2022, yang merupakan rekor terendah.

"Orang-orang yang harus menjalani proses penghilangan

inilah yang akan menghadapi kerugian besar. Itu penyakit mengerikan yang akan menimpa anak-anak itu," tambahnya, sebagaimana dilansir Bloomberg pada Senin(6/3).

Tahun lalu, Jepang mencatat jumlah kematian dua kali lebih banyak dari kelahirannya. Negara itu memiliki kurang dari 800.000 kelahiran dan sekitar 1,58 juta kematian.

Tren penurunan angka kelahiran, yang lebih cepat dari perkiraan ini membuat pemerintah Jepang khawatir. Perdana Menteri Fumio Kishida berjanji mengadakan anggaran untuk anak-anak dan keluarga sebagai upaya mengendalikan penu-

runan angka kelahiran.

Populasi Jepang telah turun menjadi 124,6 juta dari puncaknya lebih dari 128 juta yang dicapai pada tahun 2008, dan laju penurunan semakin meningkat. Sementara proporsi orang berusia 65 tahun ke atas naik menjadi lebih dari 29% tahun lalu.

Negara Asia Timur lainnya, Korea Selatan bahkan mencatat tingkat kesuburan yang lebih rendah dan mencatat penurunan populasi yang lebih cepat dari Jepang.

"Tu angka kelahiran tidak turun secara bertahap, itu menukik tajam," kata Mori, seorang anggota parlemen majelis tinggi dan mantan menteri yang memberi nasihat kepada Kishida tentang masalah angka kelahiran dan masalah LGBTQ.

"Menurun berarti anak-anak yang lahir sekarang akan terlempar ke dalam masyarakat yang terdistorsi, menyusut

dan kehilangan kemampuan untuk berfungsi."

Mori memperingatkan bahwa jika tidak ada yang dilakukan, sistem jaminan sosial Jepang akan runtuh, kekuatan industri dan ekonomi akan menurun dan tidak akan ada cukup rekrutan Pasukan Bela Diri untuk melindungi negara.

Dia mengatakan bahwa membalikkan penurunan angka kelahiran saat ini akan sangat sulit karena menurunnya jumlah wanita usia subur di Jepang. Pemerintah, kata Mori, harus melakukan apa saja untuk memperlambat penurunan dan membantu mengurangi kerusakan.

Kishida belum mengumumkan isi dari paket pengeluan baru untuk mengatasi penurunan ini. Sejauh ini beberapa kebijakan dilaporkan berkaitan dengan peningkatan tunjangan anak, peningkatan penyediaan penitipan anak, dan perubahan gaya kerja.

Namun, para kritikus berpendapat mengeluarkan lebih banyak uang untuk keluarga yang memiliki anak tidak cukup untuk mengatasi masalah ini.

Sebuah makalah dari panel pemerintah tentang kesetaraan gender mengatakan bahwa diperlukan perubahan menyeluruh yang mencakup pengurangan beban perempuan dalam membesarkan anak dan mempermudah mereka untuk berpartisipasi dalam angkatan kerja setelah melahirkan.

Mori mengkritik apa yang dia katakan sebagai kecenderungan untuk memikirkan masalah ini secara terpisah dari keuangan, perdagangan, dan khususnya dari pemberdayaan perempuan.

"Kebijakan pemberdayaan perempuan dan angka kelahiran sama saja. Jika Anda menangani hal-hal ini secara terpisah, itu tidak akan efektif," ujarnya. **tom**

Sakit Parah, Pemimpin Chechnya Sekutu Putin Diduga Diracun

MOSKOW(IM) - Pemimpin Chechnya Ramzan Kadyrov, yang merupakan salah satu sekutu terdekat Presiden Rusia Vladimir Putin, dilaporkan sakit parah dengan masalah ginjal di tengah kekhawatiran dia diracun. Kadyrov, yang mendukung perang an mengizinkan penggunaan senjata nuklir melawan Ukraina, dikabarkan telah memanggil dokter terkemuka dari Uni Emirat Arab (UEA) karena dia "tidak mempercayai" dokter Rusia.

Beberapa sumber oposisi mengklaim penyakit ginjal menyebabkan ketidakhadiran Kadyrov yang mengejutkan dari pidato kenegaraan Putin pada 12 Februari. Penampilannya yang "gembung" baru-baru ini pada pertemuan baru-baru ini di istananya di ibu kota Chechnya, Grozny, dengan Denis Pushilin, kepala Republik Rakyat Donetsk (DPR) yang diserbu, juga menimbulkan kekhawatiran.

Jet pribadi mewah pemimpin Chechnya diketahui telah melakukan beberapa perjalanan baru-baru ini ke UEA, ditambah lagi dia kurang terlihat dari biasanya dalam beberapa minggu terakhir, demikian dilansir dari Mirror.

Sementara Kadyrov, (46), adalah salah satu sekutu terdekat Putin, mengkritik jalannya perang di Ukraina, terutama oleh kementerian pertahanan Rusia dan beberapa jenderal tertentu. Klaim menunjukkan Kadyrov mungkin telah diracuni, nasib yang dilaporkan menimpa sekutu dekatnya Mayor Jenderal Apti Auladunov bulan lalu dalam sebuah "percobaan pembunuhan".

"Ada informasi bahwa kepala ahli nefrologi UEA, Dr Yasin Ibrahim El-Shahat, seorang dokter terkenal dengan pengalaman 30 tahun, telah tiba di Grozny (ibukota Chechnya)," kata jurnalis Kazakh Azamat Maytanov di saluran Telegramnya, dengan mengutip sumbernya sendiri.

Dia mengatakan jika bidang keahliannya (Dr Yasin) terletak pada nefrologi, dialisis, transplantasi, glomerulonefritis, dan gagal ginjal akut. Kadyrov

diduga sangat buruk dan memiliki masalah ginjal yang serius.

Musuh Kremlin yang diasingkan, Leonid Nevzlin mengemukakan klaim tersebut, yang juga dilaporkan oleh Bild di Jerman: "Sumber saya mengonfirmasi hal ini. Kadyrov dirawat di UEA, dan ketika dia berada di Grozny untuk waktu yang singkat, seorang nephrologist dari Abu Dhabi secara khusus datang ke dia. "Kadyrov jelas tidak mempercayai dokter Rusia. Sumber saya mengatakan bahwa (masalah dengan) ginjal adalah gejala keracunan dan itu-lah yang ditakuti Kadyrov."

Kadyrov telah "membuat terlalu banyak musuh di antara para jenderal yang memiliki akses ke perkembangan GRU". GRU adalah intelijen militer Rusia, yang dianggap bertanggung jawab atas peracunan agen ganda Sergei Skripal di Inggris pada 2018.

FSB Putin juga pernah melakukan serangan racun, misalnya terhadap pemimpin oposisi Alexei Navalny pada 2020 dan Alexander Litvinenko di London pada 2006. **ans**

Korsel Beri Kompensasi ke Para Korban Kerja Paksa Jepang

SEOUL(IM) - Pemerintah Korea Selatan (Korsel) secara resmi mengusulkan pemberian kompensasi kepada 15 warga Korea yang menjadi korban kerja paksa pada masa perang Jepang, Senin (6/3). Kompensasi bakal diberikan lewat yayasan publik yang didukung Pemerintah Korsel. Dilaporkan laman Yonhap News Agency, proposal mengenai pembeban kompensasi tersebut diumumkan Menteri Luar Negeri Korsel Park Jin. Hal itu diumumkan saat pemerintahan Presiden Korsel Yoon Suk Yeol sedang berusaha membangun hubungan lebih erat dengan Jepang.

Park mengatakan, Korsel dan Jepang akan menghormati deklarasi bersama tahun 1998 yang diadopsi oleh mantan presiden Kim Dae-jung serta mantan perdana menteri Keizo Obuchi. Dalam deklarasi tersebut, kedua pemimpin menyerukan untuk mengatasi masa lalu dan membangun hubungan baru.

Kala itu Obuchi menyampaikan penyesalan atas kerusakan dan rasa sakit yang mengerikan yang ditimbulkan oleh pemerintahan kolonial Jepang terhadap rakyat Korea. Ke 15 warga Korea yang hendak diberi kompensasi oleh Pemerintah Korsel pernah menjadi korban kerja paksa oleh Mitsubishi Heavy Industries Ltd. dan Nippon Steel Corp. Para korban sebenarnya sudah memenangkan gugatan hukum.

Pada 2018, Mahkamah Agung Korsel telah memerintahkan Mitsubishi Heavy Industries Ltd dan Nippon Steel Corp untuk membayar kompensasi kepada 15 warga Korea yang menjadi korban kerja paksa tersebut. Kedua

perusahaan menghadapi risiko asetnya dilikuidasi di Korsel atas kasus itu.

Namun karena Korsel ingin membangun kemitraan lebih erat dengan Jepang, alih-alih menuntut pertanggungjawaban langsung ke pihak terkait, sekarang Seoul hanya mengharapkan sumbangan sukarela dari sektor swasta, termasuk perusahaan Jepang Dana tersebut bakal dihimpun oleh Yayasan Korban Mobilisasi Paksa yang berafiliasi dengan Kementerian Dalam Negeri Korsel.

Park Jin sempat merespons kritikus yang menyoroti minimnya partisipasi langsung dari perusahaan-perusahaan Jepang tertuduh untuk memberikan kompensasi. Dia hanya menyebut dengan perumpamaan bahwa saat ini 'gelas sudah setengah penuh'.

Park mengatakan, sisa dari gelas tersebut bisa diisi dengan tanggapan tulus dari Jepang.

Pemerintahan Presiden Yoon Suk Yeol juga berencana menggunakan Yayasan Korban Mobilisasi Paksa untuk memberi kompensasi kepada penggugat lain yang memenangkan kasus yang tertunda. Pemerintah diperkirakan akan turut meminta sumbangan dari perusahaan-perusahaan Korsel yang mendapat manfaat dari perjanjian bilateral tahun 1965. Misalnya perusahaan pembuatan baja Korsel, POSCO, di mana Jepang menawarkan hibah sebesar 300 juta dolar AS kepada Seoul.

Para korban dan sejumlah kelompok masyarakat telah memprotes keras rencana pengalihan tanggung jawab pemberian kompensasi oleh pemerintahan Yoon Suk Yeol tersebut. Jepang menjajah Korea selama 35 tahun, yakni sejak 1910 hingga 1945. **gul**



SITUS ARKEOLOGI DUR KURIGALZU

Ziggurat besar terlihat di situs arkeologi Dur Kurigalzu, sebelah barat Baghdad, Irak, Minggu (5/3).

XINHUA